

Pendapatan Daerah Naik Rp40 M, KUA-PPAS Perubahan APBD 2019 Disepakati



<https://kassel.prokal.co>

Setelah mencapai kesepakatan pada rapat finalisasi di tanggal 19 Agustus lalu. DPRD Banjarbaru kembali menggelar Rapat Paripurna lanjutan terkait KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBDⁱ & Prioritas Plafon Anggaran Sementara) perubahan tahun anggaran 2019 pada Senin (26/8).

Dijelaskan, jika rapat paripurna ini membahas tahapan akhir, yakni penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Diterangkan oleh Iwansyah, jika kesepakatan yang lalu diantaranya meliputi beberapa perubahan. Seperti perubahan rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, Plafon anggaran per-urusan, per-program kegiatan SKPD, baik yang terkait dengan rencana belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

"Melihat hal itu, maka berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, APBD kota Banjarbaru tahun anggaran 2019 secara garis besar diproyeksikan bakal mengalami perubahan. Baik dari sisi Pendapatan, Belanja, maupun terjadinya defisit," bukannya.

Dari data yang diperoleh, tercatat jika sisi pendapatan daerah terjadi peningkatan sebesar Rp40 miliar lebih. Ini didapat dari rincian yang mana pada anggaran semula sebesar Rp1.083.039.606.165 naik menjadi Rp1.123.893.871.700.

Lalu dari sisi belanja, disebutkan juga mengalami kenaikan dari anggaran semula. Yang totalnya mencapai Rp49 miliar. Dengan rincian belanja semula sebesar Rp1.246.890.568.950 menjadi Rp1.296.352.076.295.

Adapun, selisih pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit atau berkurangnya kas dalam keuangan. Disebutkan totalnya mencapai Rp172 miliar.

Atas defisit ini, rencananya akan ditutupi melalui pos penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp169 miliar serta pencarian dana cadangan sebesar Rp32 miliar.

Kemudian, sisa uang dari hasil menutup defisit tersebut sebesar Rp30 miliar akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp10 Miliar dan untuk pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sebesar Rp20 miliar.

"Pembahasan yang telah di lakukan tadi sudah didasari pada keinginan kita bersama untuk mencermati dan menentukan program-program berdasarkan prioritas kebutuhan yang harus di akomodir untuk di anggarkan dalam APBD-Perubahan tahun anggaran 2019," jelas Iwansyah.

Secara terpisah sesuai paripurna, Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, mengungkapkan apresiasinya terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarbaru yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya Khususnya katanya dalam memberikan dukungan, menelaah, membahas dan menyempurnakan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2019.

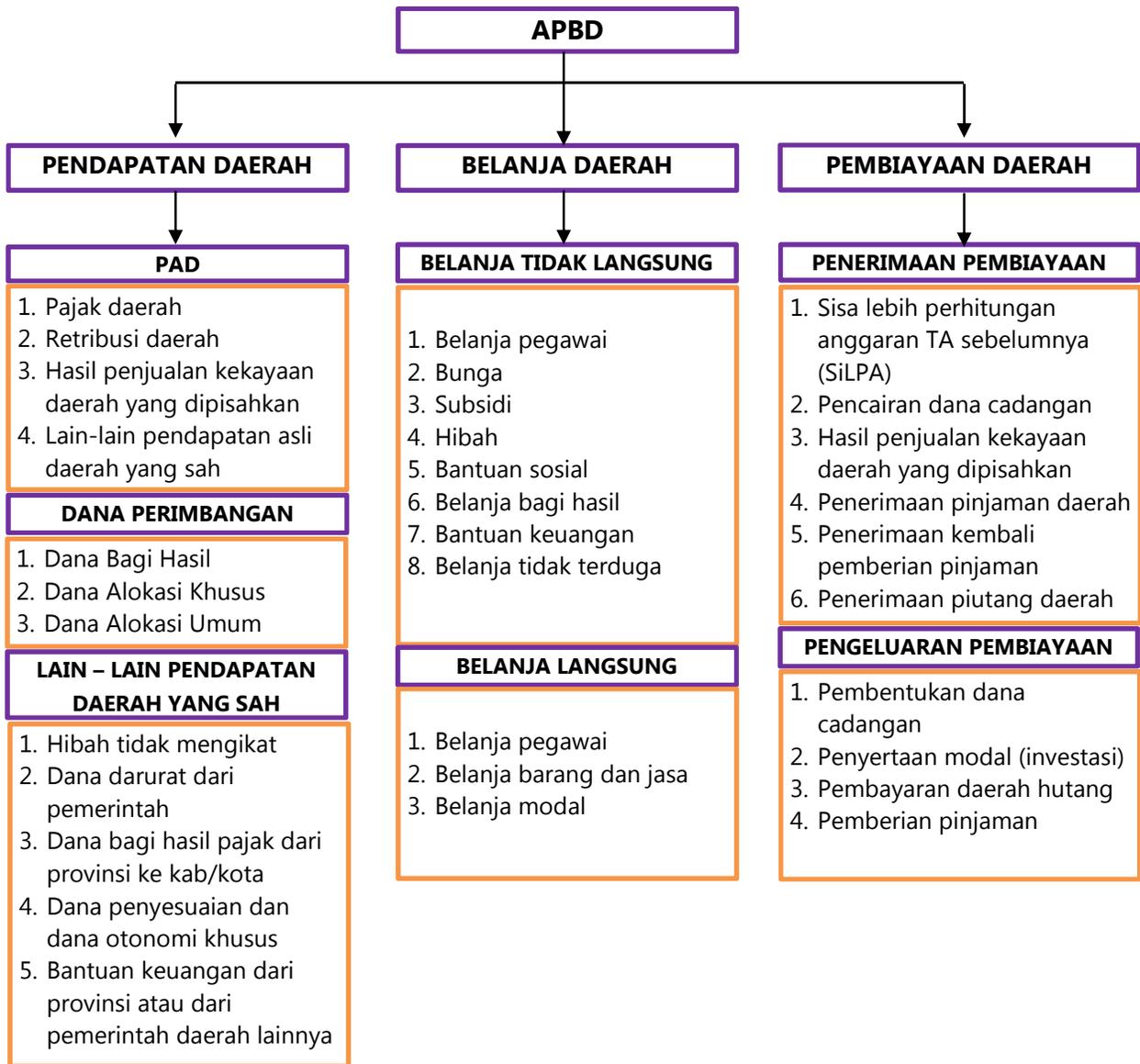
"Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sudah ditetapkan. Jadi nanti tinggal operasionalnya saja dilakukan pembahasan selanjutnya. Semoga kita bisa menuntaskan APBD murni tahun 2020 dan APBD perubahan dengan anggota dewan periode saat ini," jawabnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019 Ditandatangani, Pendapatan Banjarbaru Naik Jadi Segini, Senin, 26 Agustus 2019.
2. <http://kalsel.prokal.co>, Pendapatan Daerah Naik Rp40 M, KUA-PPAS Perubahan APBD 2019 Disepakati, Selasa, 27 Agustus 2019.

Catatan:

Struktur APBD



ⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).